

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak dilaksanakan harus berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepentingan nasional. Pengampunan Pajak merupakan hak bagi setiap Wajib Pajak kecuali bagi Wajib Pajak yang dikecualikan oleh Undang-Undang Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak atas perolehan harta yang dimiliki Wajib Pajak yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan di dalam SPT PPh Tahunan atas kewajiban PPh, PPN dan PPnBM sampai dengan tahun pajak tahun 2015. Wajib Pajak yang ikut pengampunan pajak harus memenuhi semua persyaratan serta membayar sejumlah uang tebusan. Wajib Pajak yang ikut pengampunan pajak memperoleh fasilitas berupa pengampunan pajak yaitu tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hingga tahun pajak tahun 2015 Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak yang merupakan pintu masuk bagi otoritas perpajakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang ikut pengampunan pajak. Ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) kontradiksi dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak. Dimana kepastian hukum yang seharusnya diperoleh Wajib Pajak yang ikut pengampunan pajak menjadi tidak pasti. Bagi Wajib Pajak yang dikecualikan oleh Undang-Undang Pengampunan Pajak sehingga tidak dapat ikut pengampunan pajak mengusik rasa ketidakadilan karena Wajib Pajak yang dikecualikan oleh Undang-Undang Pengampunan Pajak merupakan Wajib Pajak yang belum atau belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dimana Wajib Pajak ini membutuhkan pengampunan pajak. Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang ikut pengampunan pajak dan keadilan bagi Wajib Pajak yang tidak ikut pengampunan pajak. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya serta buku-buku mengenai pajak dan pengampunan pajak dan referensi-referensi yang terkait. Kepastian hukum dan keadilan sangat dibutuhkan bagi Wajib Pajak karena dengan timbulnya kepercayaan kepada pemerintah maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat dan sehingga pajak bagi negara dapat ditanggung bersama-sama oleh semua Wajib Pajak yang merupakan bentuk dari keadilan.

Kata Kunci: Pengampunan Pajak, Wajib Pajak, Kepastian Hukum dan Keadilan.

ABSTRACT

Under the Tax Amnesty Law Act, tax amnesty should be based on the principle of legal certainty, justice, benefit and national interest. Tax amnesty is the right of every Taxpayer except for a Taxpayer excluded by the Tax Amnesty Law Act. The tax capability of acquisition of assets owned by a Taxpayer that has not been fully reported in the Annual Income Tax Return on the obligation of Income Tax, and VAT up to the tax year of 2015. The taxpayer participating in the tax pardon shall meet all the requirements and pay the ransom. Taxpayers who participate in tax amnesty obtain facilities in the form of tax pardons that are not examined, examination of preliminary evidence and investigation of criminal acts in the field of taxation until the fiscal year 2015 Article 11 paragraph (2) Tax Amnesty Law Act. Article 18 Paragraph (1) of the Tax Amnesty Law Act which is the entrance for tax authorities to conduct examination of Taxpayers with tax amnesty. The provisions of Article 18 paragraph (1) contradictory to Article 11 paragraph (2) of the Tax Amnesty Law Act. Where the legal certainty that should be obtained Taxpayers who join tax amnesty to be uncertain. For Taxpayers who are excluded by the Tax Amnesty Law Act so as not to be able to join the tax pardon to disturb the feeling of injustice because the Taxpayer who is exempted by the Tax Amnesty Law Act is a Taxpayer who has not or has not fully fulfilled his tax obligation in accordance with the provisions of the taxation legislation where the Taxpayer needs tax amnesty. Writing this thesis aims to analyze the legal certainty for Taxpayers who join the tax pardon and justice for the Taxpayers who do not participate in tax amnesty. The research method that the writer uses is the normative juridical which refers to the legislation and its implementation regulations as well as books on taxes and tax amnesty and related references. Legal certainty and justice is needed for the Taxpayer because with the advent of trust to the government then the taxpayer compliance level will increase and so the tax for the country can be borne together by all Taxpayer which is form of justice

Keywords: *Tax amnesty, taxpayer, legal certainty and justice.*